Berikut ini berita dari majalah TEMPO edisi 27 januari – 2 Februari 2014, semoga bermanfaat bagi pembacanya.

TEMPO : KOLOM
SENIN, 27 JANUARI 2014, HAL 82

ANTARA CINA, CHINA, TIONGKOK, DAN ... CUNGKUO

A. Dahana*

ADA semacam kerepotan yang kita hadapi baik pada pergaulan sehari-hari, menulis, percakapan formal dan informal, maupun pada waktu mengucapkan pidato resmi atau tak resmi. Itulah kata atau istilah yang mengacu pada sebutan untuk Tiongkok sebagai negeri dan etnis Tionghoa sebagai salah satu kelompok etnis di negeri kita.

Soal itu tampaknya sederhana, tapi tak sesederhana itu. Dalam hampir semua diskusi mengenai Cina, yang tak ada hubungannya dengan istilah tersebut, istilah "Tiongkok", "Cina", dan "Tionghoa" selalu muncul dan perdebatannya tak pernah usai.

Dulu istilah-istilah yang disebut pada judul tulisan ini digunakan secara bergantian tanpa makna atau maksud terselubung. Namun kini keadaannya lain. Istilah "Cina" oleh sebagian orang dianggap sebagai penghinaan baik terhadap Tiongkok sebagai negeri maupun terhadap etnis Tionghoa sebagai kelompok etnis. Akibatnya, kita harus berhati-hati dengan siapa kita bercakap. Siapa tahu lawan kita ngobrol tersinggung pada istilah "Cina".
Sebagai catatan, pemerintah Orde Baru dengan Edaran Presidium Kabinet Ampera tentang Masalah Cina Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967 menyampaikan imbauan agar istilah "Cina" digunakan secara umum karena itulah yang katanya benar. Surat edaran itu juga menganjurkan agar istilah "Tiongkok" dan "Tionghoa" sejak surat tersebut terbit ditinggalkan saja. Tak jelas apa dasar surat edaran yang ditandatangani Jenderal Sudharmono, yang waktu itu menjabat Sekretaris Kabinet, tersebut.

Republik Rakyat China (RRC) punya jalan keluar yang unik. Tak lama setelah pemerintah Orde Baru runtuh dan reformasi dimulai, mereka menuntut pemerintah dan publik Indonesia mulai menggunakan istilah "China" buat

mengacu pada Negeri Tiongkok. Sejak itu, istilah resmi yang digunakan pemerintah Indonesia adalah "China". Para pembicara di seminar ataupun di media elektronik tak ketinggalan menggunakan "China". Sebagian besar media cetak dan media dunia maya pun mulai menggunakannya.

Dalam percakapan dengan rekan-rekan wartawan, penulis, dosen, dan lain-lain, kita mendapat banyak masukan menarik, dan seringkali sedikit lucu, yang bisa dicatat pada tulisan ini. Orang yang bertahan dengan istilah "Cina" punya alasan yang masuk akal. Mereka segan menggunakan "China" lantaran kata itu tidak ada dalam kosakata bahasa Indonesia. Mereka mengusulkan bagaimana kalau Komisi Istilah dari Lembaga Bahasa menetapkan istilah yang lebih mengindonesia, misalnya "Caina".

Atau, kalau kata itu bisa tertukar dengan kata bahasa Sunda yang berarti "airnya", pilihlah istilah lain, misalnya "Cayne" atau "Cayna". Lalu, kalau ada golongan etnis China yang keberatan disebut "Cina", sudah ada istilah lain yang telah melembaga, yakni Tionghoa.

Yang menarik lagi, ada komentar cukup unik. Katanya, "kalau ada orang Indonesia merasa tersinggung lantaran negeri mereka disebut "Indon" di Malaysia, itu masuk akal," ujar mereka. Tapi mereka tak habis pikir mengapa ada orang Indonesia merasa tersinggung karena Negeri China disebut Cina.

Saya punya pengalaman menarik tentang kekisruhan penggunaan istilah "Cina" dan "China" ini. Pada masa Orde Baru, saya menjadi anggota delegasi Universitas Indonesia yang diundang oleh Universitas Peking (Beida) buat mengadakan kerja sama. Ketika kami harus menyusun sebuah MOU, timbulah masalah. Sebab, sebagai universitas milik pemerintah, kami harus menggunakan istilah "Cina". Sedangkan tuan rumah berkeras kami menggunakan kata "Tiongkok". Karena tidak tercapai kompromi, MOU itu akhirnya disusun menggunakan bahasa Inggris.

Untuk keluar dari kekisruhan istilah ini, Remy Sylado, penulis kondang, mengusulkan sebuah terobosan yang tak kurang menariknya. Di sebuah diskusi dalam rangka Borobudur Festival, Oktober tahun lalu, ia mengemukakan ide bagaimana kalau kita menggunakan istilah "Cungkuo" saja. Ini memang sejalan dengan penamaan orang Cina memberi nama negeri mereka "Zhongguo" atau "Negeri di Tengah Dunia", yang sering diterjemahkan secara bebas dengan "Pusat Kebudayaan Dunia". Maka kita bisa terbebas dari kontroversi istilah "Cina" dan "China", dan semua orang akan senang.

Mendengar apa yang disampaikan Saudara Remy, saya jadi teringat kepada seorang kawan yang mengajar bahasa Tionghoa di Surabaya. Ia menulis surat kepada saya, mengusulkan agar kita menulis petisi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengubah nama "People's Republic of China" menjadi "People's

Republic of Zhongguo". Itu dilakukan agar kontroversi istilah "Cina" dan "China" selesai.

Ide Saudara Remy dan kawan saya orang Surabaya itu memang jenius. Asalkan penggantian istilah tersebut tidak melebar ke kata-kata yang sudah melembaga di masyarakat kita. Misalnya kita tak usah menyebut "petai cungkuo" buat "petai cina", "pecungkuoan" buat "pecinan", atau lebih ekstrem lagi : "Pondok Cina" menjadi "Pondok Cungkuo" buat sebuah stasiun kereta api setelah stasiun UI ke arah Bogor dan "Bidara Cina" di Cawang jadi "Bidara Cungkuo". Atau "Program Studi Cina" di Fakultas Ilmu Budaya UI menjadi "Program Studi Cungkuo".

***Pengamat Cina**